



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan Di Kota Surabaya Jawa Timur

Robbiatul Adawiyah Awahah
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Joko Widodo
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Radjikan Radjikan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Address: Jalan Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo,
Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118

Corresponding author: robbiatul234@gmail.com

Abstract: *The growth of motorized vehicles is influenced by increased vehicle production and limited public transportation services. The government has launched various models of public transportation to overcome traffic jams in Surabaya due to lack of attention to public transportation. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the policy for organizing people's transportation on the road by public transportation as an effort to reduce congestion in the city of Surabaya and to find out and analyze the factors that influence the implementation of the policy for organizing people's transportation on the road by public transportation as an effort to reduce congestion in the city. Surabaya. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The findings from the research results show that in implementing regional regulation policy number 07/2006 concerning public transport on the road, the Surabaya city government has collaborated with transport organizations, operators, public transport owners and the community effectively. The Surabaya government is also increasing the implementation of these policies to achieve the goals of reducing congestion and increasing the efficiency of public transport.*

Keywords: *Congestion, Implementation, Public Policy, Public Transportation*

Abstrak: Pertumbuhan kendaraan bermotor dipengaruhi oleh peningkatan produksi kendaraan dan terbatasnya pelayanan angkutan umum. Pemerintah meluncurkan berbagai model angkutan umum untuk mengatasi kemacetan di Surabaya akibat minimnya perhatian pada transportasi umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di kota Surabaya dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah nomor 07 tahun 2006 tentang angkutan umum di jalan raya, pemerintah kota Surabaya telah melakukan kerjasama dengan organisasi angkutan, operator, pemilik angkutan umum dan masyarakat secara efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan adalah kinerja pemerintah Surabaya juga meningkatkan penerapan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi umum.

Kata kunci: Angkutan Umum, Implementasi, Kebijakan Publik, Kemacetan

PENDAHULUAN

Transportasi umum merupakan kebutuhan masyarakat dan komponen penting dalam pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Transportasi umum berperan penting dalam mendorong mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas karena kapasitas transportasinya yang luas. Selain itu, penggunaan transportasi umum secara efektif membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan (Widayant et al., 2014).

Permasalahan transportasi perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan transportasi umum, merupakan hal yang krusial bagi kehidupan kota karena sebagian besar penduduk kota sangat bergantung pada transportasi umum untuk bepergian dan melakukan tugas sehari-hari. Urbanisasi telah meningkat secara signifikan sebagai akibat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut, yang memberikan akses terhadap lebih banyak pilihan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat. Akibatnya, daerah perkotaan mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dan populasi yang pesat.

Surabaya salah satu kota padat di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan jaringan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem jaringan jalan Surabaya tidak mampu lagi mengimbangi pertumbuhan penduduk. Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah mengurangi kemacetan lalu lintas dengan perluasan jaringan Surabaya Intelligent Transport System (SITS) dan rekayasa lalu lintas di beberapa wilayah. Pemerintah Kota Surabaya telah merilis Perda No. 7/2006 untuk mengatur angkutan umum di jalan sejak 10 Agustus 2006. Kemacetan terjadi saat lalu lintas tidak stabil, kecepatan menurun cepat karena hambatan dan kebebasan bergerak terbatas. Lalu lintas tergantung pada kapasitas jalan, jika kapasitas tidak mencukupi maka terjadi kemacetan. (Hariyono & Prawesthi, 2015).

Kenaikan kendaraan bermotor karena produksi kendaraan meningkat dan angkutan umum yang tidak memadai. Salah satu masalah lainnya adalah kurangnya angkutan transit yang menghubungkan perjalanan dari daerah terpencil ke jalur utama angkutan umum. (Slamet, 2015). Transportasi umum di Surabaya kurang aman dan waktu pemberangkatan tidak tepat, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk menghemat waktu. Kemacetan lalu lintas juga dipengaruhi oleh buruknya kinerja instansi yang bertanggung jawab dalam transportasi perkotaan, menyebabkan masalah struktural. Masalah lain termasuk perencanaan lahan dan transportasi yang belum harmonis, serta tingkat kemacetan yang rendah. disiplin transportasi

Kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya biasa terjadi pada jam sibuk pukul 07.00 dan 16.00 (WIB) ada masyarakat yang berangkat dan pulang kerja sehingga menghambat arus

lalu lintas. Rutinitas ini berulang sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Permasalahan lain terkait kemacetan lalu lintas di Surabaya adalah lalu lintas. Permasalahan transportasi menjadi hal yang sangat memprihatinkan, terutama dalam penyelesaian permasalahan transportasi umum akibat kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini semakin diperumit dengan adanya kebijakan sistem transportasi yang cenderung berpihak pada pengguna mobil pribadi namun mengabaikan kepentingan masyarakat lokal yang mayoritas adalah pengguna angkutan umum. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi meluncurkan angkutan Suroboyo Bus, Bus Trans Semanggi Surabaya, dan angkutan feeder bernama Wira Wiri Suroboyo. Kurangnya perhatian pada transportasi umum menyebabkan kemacetan di Surabaya pada saat-saat tertentu. Angkutan umum bergantung pada bus yang kapasitas dan kualitasnya kurang memadai. (Istianto et al., 2019).

Dengan kesenjangan yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di kota Surabaya dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di kota Surabaya.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindel adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pemerintah. Berbagai pihak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan sejumlah faktor menentukan hasilnya. atau output akhir yang mencakup interaksi antara para pembuat keputusan dan materi program yang diinginkan (NUGRAHA, 2021). Salah satu cara untuk melihat proses politik adalah melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, yang memiliki berbagai kepentingan dan kekuatan yang dapat menyebabkan konflik. Di sisi lain, proses administratif adalah proses umum mengenai tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Teori implementasi kebijakan menurut Grindle, teori ini dikenal dengan “Implementation as Political and Administrative Process”. Keberhasilan dalam suatu program dapat dilihat dari suatu proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu berhasil atau

tidaknya tujuan yang akan dicapai. Dalam keberhasilan suatu program dapat dilihat dengan dua hal yaitu proses kebijakan, apakah dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan mengarah pada pelaksanaan kebijakannya.

Isi kebijakan (content of policy) :

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) Pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dihasilkan.
- 7) Lingkungan implementasi (context of implementation) :
- 8) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 9) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 10) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada “implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di kota Surabaya” dan “faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan transportasi umum dalam hal mengatasi kemacetan”. Obyek utama penelitian ini yaitu meneliti apakah kemacetan di kota Surabaya ini masih sering terjadi di jalanan protokol kota Surabaya. Fokus penelitian ini berdasarkan teori dari Merilee S. Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk data yang digunakan dalam mengumpulkan informasi terkait dengan angkutan umum yang beredar di jalanan Kota Surabaya dalam upaya mengurangi kemacetan yaitu data primer dengan melakukan wawancara dengan informan.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data yang dikembangkan Miles & Huberman, yang menggunakan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan

Kepentingan mempengaruhi sejauh mana kelompok sasaran diintegrasikan ke dalam kebijakan. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 07/2006 tentang angkutan umum adalah inisiatif Dinas Perhubungan untuk memberikan fasilitas angkutan bagi masyarakat. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah kota melalui dinas perhubungan untuk mengajak masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Perwali No. 26 Tahun 2009 mewajibkan angkutan umum di daerah masing-masing. Sama halnya dengan penelitian (Yuniarti & Erowati, 2022) menjelaskan tentang kepentingan yang mempengaruhi kebijakan dengan dukungan dari pemerintah kota dan dinas terkait untuk mewujudkan program sesuai dengan sasaran. Adapun dari kepentingan masyarakat dari peraturan daerah ini untuk pemerintah dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dalam angkutan umum agar masyarakat merubah kebiasaannya untuk dapat mulai menggunakan angkutan umum. Pemerintah berupaya memberikan informasi, seperti mendorong penggunaan transportasi umum, melalui kegiatan sosialisasi. Masyarakat perlu mengetahui kebijakan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Pada indikator ini, dalam suatu kebijakan terkait jenis manfaat yang akan dihasilkan merupakan suatu kebijakan yang harus memiliki kebermanfaatan dan keberhasilan yang memberikan dampak positif dalam pengimplementasiannya. Manfaat dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2006 yaitu: 1) dengan menggunakan angkutan umum dapat mengurangi kemacetan, 2) langit biru atau polusi, semakin banyak penggunaan kendaraan pribadi maka akan menyebabkan penambahan polusi yang ada, dan apabila masyarakat kembali ke angkutan umum maka dapat menurunkan angka polusi, 3) keefisiensi waktu, terkait penggunaan kendaraan pribadi yang banyak akan menimbulkan jalanan macet, maka akan menambah waktu tempuh yang lebih lama. Dimana hal tersebut sama seperti dengan penelitian terdahulu (Yuniarti & Erowati, 2022) manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan mulai dari respon yang diberikan oleh sasaran dalam implementasi program. Keberhasilan

suatu program dan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Derajat perubahan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentunya mempunyai dasar kebijakan yang berfokus dalam menginginkan adanya perubahan pada suatu bentuk maupun situasi. Jika suatu kebijakan tidak memiliki tujuan dengan skala yang jelas dan terukur, maka implementasinya akan lebih sulit, yang berarti perubahan yang akan dicapai dengan adanya implementasi, sehingga memberikan berapa besar perubahan yang dihasilkan. Sama halnya dengan penelitian terdahulu (Yuniarti & Erowati, 2022) Implementasi harus memberikan perubahan yang baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kebijakan angkutan orang dan kendaraan umum di Surabaya bertujuan mengurangi kemacetan. Faktor penting dalam implementasi kebijakan ini adalah dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Dengan demikian, kebijakan akan terlaksana sejalan dengan harapan pemerintah. Pemerintah juga berupaya melakukan perubahan terhadap transportasi umum di jalan. Temuan yang di dapatkan di lapangan terkait dengan derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan ini yaitu:

Kebijakan yang sudah ada, pemerintah melakukan segala cara untuk meningkatkan modanya yang dulunya masih konvensional serta dari segi keamanan dan kenyamanan. Dahulu masih terdapat angkot dan bis kota yang kualitasnya belum memadai dan dengan berjalannya waktu pemerintah meningkatkan menjadi angkot dan bis kota dengan pendingin serta upaya peningkatan kualitas lainnya kepada masyarakat.

Adanya bentuk keseriusan pada pemerintah guna menggalakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum agar permasalahan kemacetan di kota Surabaya dapat berkurang. Dari hasil wawancara dengan implementor dan pengguna angkutan bahwa tren pengguna angkutan umum semakin meningkat artinya kebiasaan masyarakat sudah mulai berubah menggunakan angkutan umum yang murah, aman dan nyaman.

Kedudukan pembuat kebijakan.

Dalam indikator ini letak pengambilan keputusan kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dan kendaraan umum menginginkan terjadinya perubahan yaitu mengurangi kemacetan dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Sama halnya dengan penelitian terdahulu (Yuniarti & Erowati, 2022) menjelaskan tentang implementasi kebijakan dalam Pembuatan keputusan yang mengarah pada aspek regulasi,

penganggaran, dan monitoring dalam implementasi kebijakan harus melibatkan pemerintah, Dinas perhubungan kota Surabaya, dan para stakeholder terkait. Keberjalanan program pengangkutan umum telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan Perda No. 07/2006, ada acuan yaitu Perwali No. 26/2009 tentang angkutan umum. Perwali ini merupakan pedoman bagi dinas perhubungan.

Pelaksana program.

Pelaksana program juga harus mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam indikator ini, pelaksana program serta tim anggota yang berwenang dalam angkutan orang di jalan dan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum yaitu pemerintah kota yang menjadi pembuat kebijakan dengan beberapa peran dari organisasi yang dapat melaksanakan kebijakan dengan benar sesuai dengan harapan para pengambil keputusan. Organisasi tersebut berupa organisasi yang menaungi para pelaku usaha transportasi seperti organda, SPTI, KAKS serta pemilik-pemilik angkutan umum. Kebijakan memiliki pengaruh yang besar yang artinya sikap pelaksana dapat melaksanakan kebijakan dengan tepat sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika sikap pelaksana tidak mendukung dalam implementasi kebijakan maka implementasi tidak dapat berjalan sesuai harapan. Pelaksana kebijakan dalam penelitian terdahulu (Kusumah et al., 2022) setiap kebijakan memerlukan pelaksana yang mempunyai kemauan kuat dan komitmen tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan, sehingga harus mempunyai sikap dan komitmen terhadap kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan.

Sumber daya yang dihasilkan.

Kebijakan baru dapat diimplementasikan apabila sumber daya telah ditetapkan, dan akan berjalan dengan baik apabila sumber daya tersebut. Dalam indikator ini mengenai angkutan orang di jalan dan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan akan berjalan baik jika Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kemampuan dan dapat menjalankan Kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Implementasi kebijakan tentu saja diperlukan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu (Kusumah et al., 2022) Dalam penanganan kemacetan, sumber daya yang cukup penting dalam implementasi kebijakan. Konsistensi pada ketentuan dan aturan kebijakan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Jika pegawai pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bekerja secara efektif, implementasi

kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, biaya fasilitas yang digunakan dalam angkutan umum di jalan didanai oleh pemerintah kota melalui dinas perhubungan. SDM digunakan untuk melaksanakan kebijakan dengan beralih ke angkutan umum. Pemerintah telah menyediakan fasilitas terbaik agar masyarakat nyaman dan biayanya terjangkau.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Pada indikator ini Dalam penerapan kebijakan angkutan umum, pemerintah kota Surabaya, yang diwakili oleh walikota, memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang dipimpin oleh kepala dinas, sekretaris, dan beberapa kabid, juga turut membantu dalam implementasi kebijakan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini memiliki kepentingan, strategi, dan kekuatan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu (Yuniarti & Erowati, 2022) Dalam implementasi kebijakan untuk mengatasi kemacetan, pemerintah kota Surabaya memiliki kewenangan pelaksanaan Perda No. 07 Tahun 2006. Kepentingan pengguna jalan dalam kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk mengubah kebiasaan penggunaan angkutan. Dengan adanya sasaran kebijakan, diharapkan pihak yang terlibat dapat mendorong penggunaan angkutan umum seperti yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2006. Hal ini bertujuan mengurangi kemacetan dengan mempromosikan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi.

Karakteristik lembaga dan penguasa

Tujuan bagian ini adalah menjelaskan karakteristik lembaga dan pemerintah yang mempengaruhi kebijakan untuk mewujudkan implementasinya. Dalam memerangi kemacetan di Surabaya, pemerintah kota dan Dinas Perhubungan perlu mengatur tingkat kemacetan agar transportasi umum lebih dipilih daripada kendaraan pribadi. Sesuai dalam penelitian terdahulu (Yuniarti & Erowati, 2022) keinginan, perilaku, dan karakteristik implementasi kebijakan berperan penting dalam melaksanakan kebijakan sesuai tujuan atau spesifikasinya. Pemenuhan sifat-sifat penting untuk memastikan penguasa menjalankan tugas sesuai peraturan. Dalam wawancara dengan informan, bidang angkutan perlu mendapatkan dukungan akan manfaat program angkutan umum dalam mengurangi kemacetan di jalan.

Kepatuhan dan daya tanggap

Pada indikator ini, melihat seberapa patuh dan responsif pelaksana dalam menanggapi kebijakan penyelenggaraan angkutan umum. Kepatuhan dan respons dari pelaksana faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi penyelenggaraan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan. Perilaku sasaran berpengaruh pada kinerja kebijakan. Partisipasi

masyarakat juga diperlukan untuk suksesnya kebijakan angkutan di Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu (Kusumah et al., 2022) implementasi kebijakan penanganan kemacetan membutuhkan kepatuhan pelaksana terhadap aturan pemerintahan yang mapan. Pelaksana harus mengetahui apakah ada orang lain yang terlibat dan patuh terhadap hukum. Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah kota Surabaya nomor 07 tahun 2006 dalam hal kepatuhan dan daya tanggap sudah baik, namun masih belum mencapai target dan harapan yang diinginkan. Untuk menggalakkan penggunaan angkutan umum, masyarakat harus mematuhi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatur angkutan umum, namun jika masyarakat tidak mematuhi atau tidak menggunakan angkutan umum, maka semuanya menjadi sia-sia. Penggunaan angkutan umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai harapan yang diinginkan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum

Pelaksana Program

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dibuat untuk dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Oleh karena itu, tidak lepas dari peran beberapa organisasi pengelola transportasi seperti ORGANDA, SPTI, dan KAKS. Oleh karena itu, peserta pertama adalah pemerintah, disusul oleh operator yang mengelola organisasi tersebut dan juga pemilik angkutan umum.

Tingkat Kepatuhan

Sebagian besar pengguna jalan di Kota Surabaya sudah mematahui terkait adanya penggunaan angkutan umum. Pemerintah kota untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini berkolaborasi dengan beberapa pihak agar pengguna angkutan semakin bertambah yaitu dengan organisasi para pelaku usaha transportasi.

Sumber Daya Manusia

Besarnya penggunaan kendaraan pribadi juga mempengaruhi peningkatan jumlah emisi kendaraan yang digunakan yang menyebabkan polusi udara menjadi tidak sehat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum menjadi usaha pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat yang ingin beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Pemerintah juga meningkatkan modanya dan fasilitasnya agar masyarakat merubah kebiasaan untuk menggunakan dan mendukung kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan angkutan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di Kota Surabaya yang tertulis pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2006 terkait pelaksanaannya sudah menjalankan tugasnya dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum menjadi tanggung jawab pemerintah kota yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi transportasi, operator, pemilik angkutan umum, dan masyarakat tersebut telah melaksanakan secara cukup baik. Pemerintah Surabaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan keberhasilannya dalam program pengurangan kemacetan dan peningkatan efisiensi angkutan umum.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan adalah kinerja pengambilan keputusan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah berusaha memastikan layanan transportasi yang berkualitas dan efisien, tetapi masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi masalah di masa depan. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya untuk mengatasi hal ini, termasuk dalam Peraturan Daerah No. 07 tahun 2006, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan undang-undang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mendorong penggunaan angkutan umum. kualitas dan efisiensi angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat yang meningkat.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di Kota Surabaya sebagai berikut :

Saran untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan di Kota Surabaya adalah dengan dapat dilakukan dengan sosialisasi yang lebih intensif mengenai penggunaan angkutan umum dibanding kendaraan pribadi. Fasilitas angkutan umum perlu ditingkatkan dengan penambahan moda dan haltenya di setiap kecamatan di kota Surabaya. Ini dapat dilakukan dengan menambah rute, memperpanjang rute, meningkatkan frekuensi dan kualitas layanan, dan memberlakukan regulasi yang ketat terhadap kendaraan umum untuk keamanan dan kualitas layanan.

Saran untuk faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum seperti: menyediakan infrastruktur yang memadai (jalan yang baik, halte bus yang lebih banyak, jalur khusus untuk kendaraan umum, dan terminal yang terorganisir dengan baik. Diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum untuk suksesnya kebijakan ini. Kampanye penyuluhan dan edukasi tentang manfaat transportasi publik serta pengaturan fasilitas yang ramah pengguna akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Hariyono, D. W., & Prawesthi, W. (2015). Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 2(2), 177. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v2i2.120>
- Istianto, B., et al. (2019). *Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Melvana Publishing.
- Kusumah, D., Sutarjo, M., & Zulkarnaen, I. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA CIREBON (Studi Kasus di Jalan Pekiringan). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 323. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7648>
- NUGRAHA, B. (2021). Implementasi peraturan menteri pekerjaan umum nomor 5 tahun 2008 di kota tasikmalaya. Universitas Siliwangi. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/2618>
- Prasojo, E., & Abdi Salam, A. (2022). DKI Jakarta's Odd-Even Transportation Policy Formulation from The Perspective of Evidence Based Policy. *Policy & Governance Review*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i1.439>
- Slamet, S. B. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 7 Tahun 2006 (Study Tentang Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Massal Di Kota Surabaya Upaya Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Dan Pelayanan Sektor Publik). UNIVERSITAS AIRLANGGA. <https://repository.unair.ac.id/33986/>
- Widayant, A., Soeparno, & Karunia, B. (2014). Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya. *Jurnal Transportasi*, 14(1), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jtrans.v14i1.1374.%25p>
- Yuniarti, N. G., & Erowati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung (Tmb) Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Bandung Tahun 2022 Policy Implementation of the Trans Metro Bandung (Tmb) Program To Overcome Congratulations in the City of Bandung in 2022. *Sosiohumaniora*, 1(2), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/40693>